



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 37 TAHUN 2019

T E N T A N G

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1952);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 10);

25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang  
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran  
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019  
Nomor 4);

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.**

**Pasal 1**

Laporan realisasi anggaran tahun 2018 terdiri atas :

1. Pendapatan, yang terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	2.194.867.823.990,63	
b. Pendapatan Transfer	Rp	3.444.983.949.610,00	
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp	20.206.840.440,00	
Jumlah Pendapatan			Rp 5.660.058.614.040,63

2. Belanja, yang terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp	1.145.456.637.494,75	
2) Belanja Hibah	Rp	1.516.041.608.509,47	
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp	1.385.000.000,00	
4) Belanja Bagi Hasil	Rp	958.430.675.845,00	
5) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	2.977.319.200,00	
6) Belanja Tidak terduga	Rp	1.001.131.300,00	
Jumlah Belanja Tidak Langsung			Rp 3.625.292.372.349,22

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp	158.418.656.762,00	
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	881.206.324.583,63	
3) Belanja Modal	Rp	676.487.480.501,70	
Jumlah Belanja Langsung			Rp 1.716.112.461.847,33

Jumlah Belanja

Rp 5.341.404.834.196,55

Surplus/(Defisit)

Rp 318.653.779.844,08

c. Pembiayaan, yang terdiri dari:

1) Penerimaan	Rp	212.122.428.187,69	
2) Pengeluaran	Rp	165.870.000.000,00	
Jumlah Pembiayaan Netto			Rp 46.252.428.187,69

Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA)

Rp 364.906.208.031,77

## Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 3

- (1) Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.
- (2) Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 08 Agustus 2019

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 08 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH  
\* PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 38

**LAMPIRAN I**  
**RINGKASAN LAPORAN REALISASI**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN**  
**BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
 RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
 TAHUN ANGGARAN 2018

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/KURANG	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	5.319.255.507,127,00	5.660.058.614.040,63	340.803.106.913,63	106,41
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.791.581.091.087,00	2.194.867.823.990,63	403.286.732.903,63	122,51
3	Pendapatan Pajak Daerah	1.519.724.639.000,00	1.919.257.811.014,00	399.533.172.014,00	126,29
4	Pendapatan Retribusi Daerah	39.330.768.500,00	40.482.187.399,00	1.151.418.899,00	102,93
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	74.523.253.587,00	79.727.132.076,18	4.803.878.489,18	106,41
6	Lain-lain PAD yang sah	157.602.430.000,00	155.400.693.501,45	-2.201.736.498,55	98,6
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	1.791.581.091.087,00	2.194.867.823.990,63	403.286.732.903,63	122,51
9	PENDAPATAN TRANSFER	3.625.443.054.040,00	3.462.831.829.650,00	-62.611.224.390,00	98,22
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	3.507.095.169.000,00	3.444.983.949.610,00	-62.111.219.390,00	98,23
11	Dana Bagi Hasil Pajak	158.472.552.000,00	147.538.279.080,00	-10.936.272.920,00	93,1
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	69.514.130.000,00	64.690.232.937,00	-4.823.897.063,00	93,06
13	Dana Alokasi Umum	1.724.402.496.000,00	1.724.402.496.000,00	0	100
14	Dana Alokasi Khusus	1.554.705.991.000,00	1.508.354.941.593,00	-46.351.049.407,00	97,02
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	3.507.095.169.000,00	3.444.983.949.610,00	-62.111.219.390,00	98,23
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	18.347.885.040,00	17.847.880.040,00	-500.005.000,00	97,27
18	Dana Penyesuaian	7.250.000.000,00	7.250.000.000,00	0	100
19	Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0
20	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	11.097.885.040,00	10.597.880.040,00	-500.005.000,00	95,49
21	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	18.347.885.040,00	17.847.880.040,00	-500.005.000,00	97,27
22	Total Pendapatan Transfer	3.625.443.054.040,00	3.462.831.829.650,00	-62.611.224.390,00	98,22
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	2.231.362.000,00	2.358.960.400,00	127.598.400,00	105,72
25	Pendapatan Hibah	2.231.362.000,00	2.358.960.400,00	127.598.400,00	105,72
26	Pendapatan Dana Darurat	0	0	0	0
27	Pendapatan Lainnya	0	0	0	0
28	Jumlah Pendapatan Lain-Lain yang Sah	2.231.362.000,00	2.358.960.400,00	127.598.400,00	105,72
29	JUMLAH PENDAPATAN	5.319.255.507,127,00	5.660.058.614.040,63	340.803.106.913,63	106,41
31	BELANJA	5.443.385.607,127,00	5.341.404.834.196,55	-101.980.672.930,45	98,13
32	BELANJA OPERASI	3.533.617.432.411,00	3.702.508.227.349,85	231.109.205.061,15	94,12
33	Belanja Pegawai	1.304.713.876.771,71	1.303.875.294.256,75	-838.582.514,96	99,94
34	Belanja Barang	997.157.252.955,29	881.205.324.583,63	-115.950.928.371,66	88,37
35	Bunga	0	0	0	0
36	Subsidi	0	0	0	0
37	Hibah	1.830.346.302.684,00	1.516.041.608.509,47	-114.304.694.174,53	92,99
38	Bantuan Sosial	1.400.000.000,00	1.385.000.000,00	-15.000.000,00	98,93
39	Jumlah Belanja Operasi	3.933.617.432.411,00	3.702.508.227.349,85	231.109.205.061,15	94,12
41	BELANJA MODAL	764.833.468.096,00	676.487.480.501,70	-78.145.987.594,30	89,64
42	Belanja Tanah	3.293.993.880,00	2.054.552.625,00	-1.239.441.055,00	62,37
43	Belanja Peralatan dan Mesin	180.664.816.068,00	152.468.875.792,70	-28.195.940.275,30	84,39
44	Belanja Gedung dan Bangunan	258.830.580.850,00	227.842.994.495,00	-30.987.586.354,00	88,03
45	Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan	276.403.519.400,00	258.901.210.788,00	-17.502.308.612,00	93,67
46	Belanja Asot Tetap Lainnya	34.628.350.000,00	34.437.635.200,00	-190.714.800,00	99,45
47	Belanja Asot Lainnya	812.207.900,00	782.211.400,00	-29.995.500,00	96,31
48	Jumlah Belanja Modal	764.833.468.096,00	676.487.480.501,70	-78.145.987.594,30	89,64
50	BELANJA TAK TERDUGA	1.652.310.000,00	1.001.131.300,00	-651.178.700,00	60,59
51	Belanja Tak Terduga	1.652.310.000,00	1.001.131.300,00	-651.178.700,00	60,59
52	Jumlah Belanja Tak Terduga	1.652.310.000,00	1.001.131.300,00	-651.178.700,00	60,59
53	JUMLAH BELANJA	4.689.903.210.507,00	4.379.996.839.161,65	-309.906.371.355,45	93,39
55	TRANSFER	763.482.296.820,00	961.407.995.045,00	207.925.698.425,00	127,1
56	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA	760.602.977.420,00	958.430.875.845,00	207.927.898.425,00	127,1
57	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	750.502.977.420,00	958.430.875.845,00	207.927.898.425,00	127,1
58	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	0	0	0	0
59	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	0	0	0	0
60	Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota	760.602.977.420,00	958.430.875.845,00	207.927.898.425,00	127,1
62	TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN	2.979.319.200,00	2.977.319.200,00	-2.000.000,00	99,93
63	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	0
64	Bantuan Keuangan Lainnya	2.979.319.200,00	2.977.319.200,00	-2.000.000,00	99,93
65	Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan	2.979.319.200,00	2.977.319.200,00	-2.000.000,00	99,93
66	JUMLAH TRANSFER	763.482.296.820,00	961.407.995.045,00	207.925.698.425,00	127,1
67	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	5.443.385.607,127,00	5.341.404.834.196,55	-101.980.672.930,45	98,13
69	SURPLUS/DEFISIT	-124.130.000,00,00	318.653.779.844,08	442.783.779.844,08	-256,71

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/KURANG	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
		290.000.000.000,00	212.122.428.187,69	-77.877.571.812,31	73,15
61	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	290.000.000.000,00	212.122.428.187,69	-77.877.571.812,31	73,15
62	Penggunaan SILPA	0	0	0	0
63	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0
64	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0
65	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0	0	0	0
66	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	0
67	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0	0	0	0
68	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	0	0	0
69	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0	0	0	0
70	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0	0	0	0
71	JUMLAH PENERIMAAN	290.000.000.000,00	212.122.428.187,69	-77.877.571.812,31	73,15
72	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	165.870.000.000,00	165.870.000.000,00	0	100
73	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0	0	0	0
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	0
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0	0	0	0
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	0	0	0
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0	0	0	0
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0	0	0	0
80	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	165.870.000.000,00	165.870.000.000,00	0	100
81	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0	0	0	0
82	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0	0	0	0
83	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya	0	0	0	0
84	JUMLAH PENGELUARAN	165.870.000.000,00	165.870.000.000,00	0	100
85	PEMBIAYAAN NETTO	124.130.000.000,00	46.252.428.187,69	77.877.571.812,31	37,26
86	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0	364.906.208.031,77	364.906.208.031,77	0

